

SentriS

SENTRIS ACADEMIC JOURNAL
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG

ISSN 0216-5031

VOLUME 2 No. 2

Hal. 177 - 191

<https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4641.177-191>

Nasionalisme Inggris dan Kekerasan Berbasis Kebencian terhadap Muslim

Studi Kasus English Defence League

Dedi Yusuf

Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan,

Indonesia

dediyusupz19@gmail.com

Ignatius Satria Wibisono

Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan,

Indonesia

ignatiussatria.w@gmail.com

Muhammad Naufal Hanif

Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan,

Indonesia

enhafin@gmail.com

Nasionalisme Inggris dan Kekerasan Berbasis Kebencian terhadap Muslim *Studi Kasus English Defence League*

Dedi Yusuf¹, Ignatius Satria Wibisono², Muhammad Naufal Hanif³, Muhammad Valdy Akbar Zam⁴,
Nigel Januar Hartono⁵

¹Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, dediyusupz19@gmail.com

² Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
ignatiussatria.w@gmail.com

³ Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, enhafin@gmail.com

⁴ Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
abismaghrib13@gmail.com

⁵ Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
marcusholloway627@gmail.com

ABSTRACT

The rise of English nationalism has been a well-documented and well-researched subject since the 1990s and exacerbated by Brexit, noting roots of English identity in the form of economic insecurity, nostalgia to imperial past, xenophobia, and anti-elitism. At the same period, the rise of hate-based crime toward Muslim communities throughout England has been also well-documented and well-researched subject, with explanation on motifs of perpetrators lead to findings of individuals deep in distrust of the non-English and fear of losing their 'English identity'. Despite the strikingly similar feature between English nationalism and hate crime toward Muslims, with exception of a few, there has been little explanation that sought to connect this two contemporary phenomenon in England's identity politics. Using the example of ever-so controversial English Defence League and its leader Tommy Robinson during its peak at the end of the first 21th century decade, we found that there is at least a strong correlation between the two and a possibility of English nationalism as a important drive that directly leads to hate-based crime toward minority groups in England.

Keywords: *English nationalism, English Defence League, hate crime, Islamophobia*

ABSTRAK

Bangkitnya nasionalisme Inggris telah dicatat dan diteliti secara baik sejak dekade 1990-an, terlebih pasca-hasil Brexit, dengan catatan mengenai identitas Inggris yang mengambil bentuk ketidakamanan finansial, nostalgia atas masa lalu imperial, xenofobia, dan anti-elitisme. Pada waktu yang sama, kekerasan berbasis kebencian terhadap komunitas Muslim di berbagai kawasan Inggris juga telah diarsipkan dan dikaji dengan baik, dengan penjelasan mengenai motif pelaku mengarah pada penemuan individu-individu yang terperangkap dalam ketidakpercayaan mendalam terhadap non-Inggris dan ketakutan akan kehilangan identitasnya sebagai orang Inggris. Meskipun kedua fenomena ini memiliki fitur-fitur yang sangat mirip, jarang ditemukan penjelasan yang mengarah pada usaha untuk menghubungkan kedua fenomena kontemporer di lanskap identitas politik Inggris ini. Menggunakan contoh English Defence League yang sangat kontroversial serta pemimpinnya Tommy Robinson pada puncak aktivitas mereka di akhir dekade pertama abad ke-21, kami menemukan bahwa terdapat setidaknya korelasi kuat antara kedua fenomena dan kemungkinan nasionalisme Inggris sebagai salah satu penyebab penting yang secara langsung mengarah kepada kejadian-kejadian kejahatan berbasis kebencian untuk kaum minoritas di Inggris.

Kata Kunci: nasionalisme Inggris, English Defence League, kekerasan kebencian, Islamofobia

1. **Introduksi: Kekerasan dari Eksklusivitas Nasionalisme Inggris**

Nasionalisme sub-negara memiliki sejarah panjang dengan motif-motif konflik yang tidak kunjung selesai dan masih akan bertahan lama akibat dari akarnya yang berasal dari politik identitas. Inggris, pada abad ke-21, bukan merupakan pengecualian dari tren ini. Nasionalisme Inggris yang mulai muncul pada akhir abad ke-20 dan semakin menguat pada dua dekade terakhir ditandai dengan munculnya politik identitas yang mencoba memisahkan diri dari ‘identitas Britania’. Rasa ‘ke-Inggris-an’ ini, sama halnya namun jauh berbeda akar dan motifnya dari identitas Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, menjadi perhatian banyak peneliti, apalagi setelah lepasnya Inggris Raya dari Uni Eropa pada tahun 2015.

Nasionalisme Inggris ditandai oleh banyak hal. Survei ekstensif menunjukkan bahwa semakin hari, warga Inggris semakin merasa terpisah dari dua persatuan: Uni Eropa dan Inggris Raya. Digadang-gadang sebagai ‘singa yang akhirnya mengaum’, Inggris sebagai bangsa (*nation* dalam *nasionalisme*) akhirnya bermunculan sebagai bagian dari sentimen kolektif ketidakpercayaan terhadap elit politik, sistem politik, maupun tatanan ekonomi dan sosial global yang dianggap tidak menguntungkan serta mengalienasi warga Inggris¹. Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Inggris dari berbagai latar belakang menganggap bahwa tatanan politik nasional maupun regional yang ada sudah tidak lagi berpihak kepadanya. Lebih spesifik, latar belakang yang sering merasakan hal ini adalah kalangan pemuda pekerja kulit putih. Kelompok ini seringkali mempertanyakan keberpihakan Westminster, yang dianggap terlalu terisi dengan elite politik dan tidak memahami kesulitan masyarakat biasa. Lebih lanjut, keikutsertaan Inggris di Uni Eropa dianggap sebagai kekeliruan akibat keberpihakan terhadap ‘tatanan birokrasi Brussel’ alih-alih kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, kelompok ini juga cenderung mempertanyakan apa yang dianggap sebagai ‘privilese’ terhadap masyarakat Skotlandia maupun imigran. Kesimpulan dari survei ini adalah secara konsisten, semakin tinggi jumlah warga Inggris yang merasa bahwa dirinya merupakan warga ‘Inggris’, bukan ‘Britania’, atau setidaknya lebih Inggris daripada Britania.

Rasa alienasi, tidak diuntungkan, tidak diberdayakan, serta tertindas ini kemudian muncul menjadi motif dari banyaknya aksi kejahatan bermotif rasial, atau kejahatan kebencian, terhadap penduduk Muslim di Inggris. Dari berbagai kasus mulai dari tahun 1990an sampai pada puncaknya sesaat setelah 9/11, mayoritas warga Muslim di Inggris setidaknya pernah merasakan atau menganggap bahwa Islamofobia berikut manifestasi fisiknya di jalanan merupakan masalah besar di Inggris². Serangan ini cukup didokumentasikan dengan baik. Catatan Minority Rights Group International menyebutkan bahwa:

“Muslim dewasa dan anak-anak diserang, secara fisik maupun verbal. Mereka dipukul, diludahi, dihantam dengan payung di halte bus, dicekoki alkohol di kawasan publik dan dilempari buah serta sayur-sayuran. Kotoran anjing dan kembang api dikirimkan melalui kotak surat mereka, dan batu bata melalui jendela mereka. Mereka disebut sebagai pembunuh dan dikucilkan dari pertemuan-pertemuan sosial. Seorang perempuan di Swindon dibawa ke rumah sakit setelah dipukul oleh tongkat bisbol metal; dua mahasiswa Cambridge dirobek jilbabnya, di tengah siang hari bolong, di luar pos polisi.

¹ Jones, Richard Wyn, Guy Lodge, Charlie Jeffery, Glenn Gottfried, Roger Scully, Ailsa Henderson, and Daniel Wincott. “England and Its Two Unions: The Anatomy of a Nation and Its Discontents.” *Institute For Public Policy Research (IPPR)*, July 2013, 4–40. https://doi.org/https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2013/07/england-two-unions_Jul2013_11003.pdf?noredirect=1.

² Weller, P. (2006). Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslims and Liberal Democracies. The Case of the United Kingdom. *Journal of Islamic Studies*, 17(3), 295–325. <https://doi.org/10.1093/jis/etl001>

Saba Zaman, yang pada Juli 2001, direnggut jilbabnya dan dua tulang rusuknya dipatahkan di Tooting, London, diberhentikan dan diperiksa oleh polisi tiga kali pada waktu dua minggu setelah serangan teroris di Amerika Serikat. Di London Barat, seorang supir taksi Afghan bernama Hamidullah Gharwal diserang segera setelah peristiwa 11 September dan tidak bisa bergerak dari leher ke bawah. Orang-orang Sikh yang memberikan kesan Muslim dari jenggot dan turbannya juga dianiaya. Para vandal menyerang masjid-masjid dan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh orang Asia, di seantero negeri. Sembilan kepala babi digelontorkan di luar salah satu masjid di Exeter. Banyak masjid yang tidak melaporkan serangan apapun akibat ketakutan akan pembalasan³.”

Setidak-tidaknya satu organisasi telah disorot sebagai manifestasi kekerasan jalanan dari alienasi yang lahir sebagai fitur utama nasionalisme Inggris ini: English Defence League, atau EDL. Secara khusus melawan Islam dan Muslim, menganggap Islam sebagai ‘masalah fundamental’ yang akan merusak ‘ke-Inggris-an’ dan tidak bisa diubah, serta ekstremisme Muslim sebagai hal yang perlu dilawan, EDL mencapai masa yang paling aktif pada tahun 2010 sampai kepergian pemimpinnya, Tommy Robinson, pada tahun 2015⁴. Akar dari kegiatan EDL telah teridentifikasi sebagai viktimisasi⁵, islamofobia⁶, kerawanan maskulinitas hasil dari kekecewaan kelas pekerja kulit putih terhadap situasi politik⁷, rasisme⁸, atau pada umumnya identitas kolektif sebagai suatu gerakan politik⁹.

Di sisi lain, fitur-fitur yang sama juga muncul dalam literatur-literatur yang membahas nasionalisme Inggris. Rasa isolasi yang muncul dari ketiadaan masa lalu yang berjaya sebagai unit imperial global¹⁰, mendorong adanya perasaan ‘Inggris yang berubah’, perubahan yang tidak menguntungkan bagi warga Inggris sendiri¹¹. Ketika Inggris tidak menguntungkan warga Inggris, ia seringkali dipersepsikan justru menguntungkan Eropa dan elit Eropa¹²¹³¹⁴. Definisi nasionalisme Inggris modern juga ditandai dengan adanya rasa ‘ketidakadilan’ dan ‘kecemasan’ tentang posisi

³ Ansari, H. (2002). Muslims in Britain. Minority Rights Group International; *terjemahan dari penulis*

⁴ Bartlett, Jamie, dan Mark Littler. “Inside the EDL: Populist Politics in a Digital Age.” *Demos*, 2011, 57. https://doi.org/https://www.demos.co.uk/files/Inside_the_edl_WEB.pdf.

⁵ Oaten, Alexander. “The Cult of the Victim: an Analysis of the Collective Identity of the English Defence League.” *Patterns of Prejudice* 48, no. 4 (2014): 331–49. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2014.950454>.

⁶ Allen, Chris. “Opposing Islamification or Promoting Islamophobia? Understanding the English Defence League.” *Patterns of Prejudice* 45, no. 4 (2011): 279–94. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2011.585014>.

⁷ Garland, Jon, and James Treadwell. “The New Politics of Hate? An Assessment of the Appeal of the English Defence League Amongst Disadvantaged White Working- Class Communities in England.” *Journal of Hate Studies* 10, no. 1 (2012): 123. <https://doi.org/10.33972/jhs.116>.

⁸ Kassimeris, George, and Leonie Jackson. “The Ideology and Discourse of the English Defence League: ‘Not Racist, Not Violent, Just No Longer Silent.’” *The British Journal of Politics and International Relations* 17, no. 1 (2014): 171–88. <https://doi.org/10.1111/1467-856x.12036>.

⁹ Busher, Joel. “Grassroots Activism in the English Defence League: : Discourse and Public (Dis)Order.” *Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism*, March 14, 2013, 65–83. <https://doi.org/10.5040/9781501300967.ch-004>.

¹⁰ Kumar, Krishan. 2003. The Making of English National Identity. The Making of English National Identity. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511550058>.

¹¹ Jones, Richard Wyn, Guy Lodge, Charlie Jeffery, Glenn Gottfried, Roger Scully, Ailsa Hendersonn, and Daniel Wincott. “England and Its Two Unions: The Anatomy of a Nation and Its Discontents.” *Institute For Public Policy Research (IPPR)*, July 2013, 4–40. https://doi.org/https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2013/07/england-two-unions_Jul2013_1100

¹² Wellings, Ben. “Losing the Peace: Euroscepticism and the Foundations of Contemporary English Nationalism.” *Nations and Nationalism* 16, no. 3 (2010): 488–505. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2010.00447.x>.

¹³ Kenny, Michael. “The Genesis of English Nationalism.” *Political Insight* 7, no. 2 (2016): 8–11. <https://doi.org/10.1177/2041905816666124>.

¹⁴ Corbett, Steve. “The Social Consequences of Brexit for the UK and Europe: Euroscepticism, Populism, Nationalism, and Societal Division.” *The International Journal of Social Quality* 6, no. 1 (2016): 11–31. <https://doi.org/10.3167/ijsq.2016.060102>.

Inggris dan posisi orang Inggris di negaranya sendiri¹⁵. Lebih lanjut, nasionalisme ini mengambil bentuk kebencian kelas pekerja terhadap partai-partai politik yang mereka anggap telah menjauh dari keinginan mereka, termasuk dua partai utama, Partai Buruh dan Partai Konservatif¹⁶, yang menggeser politik kelas pekerja semakin eksklusif, anti-imigran, dan bergerak ke sayap kanan secara politis¹⁷.

Meskipun penjelasan tentang nasionalisme Inggris dan motif kekerasan terhadap kaum Muslim di Inggris memiliki fitur-fitur yang sama, belum banyak literatur yang berusaha secara eksplisit menghubungkan kedua hal tersebut. Namun, beberapa tulisan telah mencoba, seperti Robert Lambert yang secara eksplisit menarik kausalitas antara keterlibatan nasionalis ekstremis, seperti yang terlihat di British National Party ataupun dulu National Front, dengan kekerasan-kekerasan melawan kaum Muslim yang dilakukan oleh English Defence League¹⁸. Satu analisis Foucauldian telah memberikan perspektif Islamofobia, berikut serangan-serangan yang diakibatkan olehnya, muncul secara eksplisit dari alienasi dan pemisahan *in group* dengan *out group*¹⁹ yang merupakan fitur utama nasionalisme Inggris.

Artikel ini akan menambah usaha untuk menghubungkan unsur-unsur yang serupa ini dengan menelusuri pengaruh nasionalisme Inggris terhadap kekerasan atau kejahatan yang didasarkan pada kebencian terhadap suatu kelompok sosial, dalam hal ini kaum Muslim di Inggris. Kami berargumentasi bahwa fitur-fitur yang merupakan tema utama nasionalisme Inggris, yaitu eksklusivitas dan pengeluaran orang-orang ‘non-Inggris’, bergabung bersama rasisme dan Islamofobia yang menandai kaum Muslim sebagai ‘non-Inggris’ yang secara fundamental berbahaya bagi cara hidup masyarakat Inggris, yang pada gilirannya mengarah langsung ke kejahatan kebencian anti-Muslim.

Fokus menuju Islamofobia dalam artikel ini sendiri berasal dari begitu krusialnya isu ini di lanskap sosio-politik Eropa kontemporer pada umumnya dan Inggris pada khususnya. Dengan gelombang imigran dari Pakistan dan India pada dekade 1970-an dan 1980-an yang mengarah pada berbagai penelitian, paling tersohor di antaranya adalah *Runnymede Trust* yang untuk pertama kalinya secara komprehensif membuktikan meluasnya Islamofobia di Inggris, ditambah dengan situasi keamanan global pasca 11 September 2001 yang mendorong pemikiran ulang mengenai bagaimana imigran Muslim yang telah ada maupun yang akan datang dapat dan harus hidup berdampingan secara damai dengan penduduk lokal.

Kami akan memakai kegiatan English Defence League, utamanya ketika kelompok tersebut sangat aktif (2010-2015) sebagai studi kasus bagi kausalitas ini. EDL ditunjuk akibat bagaimana kegiatannya menghadirkan fitur-fitur yang begitu jelas tetapi pada saat bersamaan bisa jadi sangat kontradiktif, unsur yang dapat menjelaskan nasionalisme dan hubungannya terhadap kekerasan bermotif kebencian. Analisis akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akar nasionalisme Inggris, orang Inggris dan orang Muslim, serta kekerasan melawan Muslim sebagai ‘yang Lain’.

¹⁵ Aughey, Arthur. “Anxiety and Injustice: the Anatomy of Contemporary English Nationalism*.” *Nations and Nationalism* 16, no. 3 (2010): 506–24. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2009.00422.x>.

¹⁶ Mann, Robin, and Steve Fenton. *Nation, Class and Resentment: the Politics of National Identity in England, Scotland and Wales*. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017.

¹⁷ Winlow, Simon, Steve Hall, and James Treadwell. 2016. *The Rise of the Right: English Nationalism and the Transformation of Working-Class Politics*.

¹⁸ Lambert, Robert. “Anti-Muslim Violence in the UK: : Extremist Nationalist Involvement and Influence.” *Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism*, 2015, 31–64. <https://doi.org/10.5040/9781501300967.ch-003>.

¹⁹ Abbas, Tahir. “Islamophobia as Racialised Biopolitics in the United Kingdom.” *Philosophy & Social Criticism* 46, no. 5 (2020): 497–511. <https://doi.org/10.1177/0191453720903468>.

2. Analisis

a.) Akar Nasionalisme Inggris

Ketika membicarakan mengenai nasionalisme Inggris, secara mudah bisa dikatakan bahwa nasionalisme Inggris adalah upaya susunan identitas yang membedakan Inggris dari negara konstituen yang berada di bawah monarki Britania Raya. Pada perkembangannya, nasionalisme Inggris dapat diartikan sebagai sekumpulan identitas yang menganggap diri sendiri sebagai ‘orang Inggris’ alih-alih ‘orang Britania Raya’ atau ‘orang Eropa’ ditandai dengan budaya, pekerjaan, bahasa, dan agama. Kumar dalam bukunya yang berjudul *The Making of English National Identity* (2003) mengatakan bahwa mereka mempersepsikan diri sebagai orang *England* yang berbeda dari kebanyakan orang non-Inggris yang menyamakan mereka dengan orang *British*.²⁰ Kumar berpendapat bahwa nasionalisme Inggris berasal dari tujuan untuk membedakan nasionalisme mereka dengan nasionalisme *British*, Skotlandia (*Scottish*), Wales (*Welsh*), dan Irlandia Utara (*Northern-Irish*).²¹ Kumar menegaskan bahwa nasionalisme Inggris bangkit ketika akhir periode kekuasaan Edwardian yang merupakan titik penting dibalik bangkitnya nasionalisme Inggris. Nasionalisme Irlandia yang muncul sebagai gerakan untuk memerdekakan diri dari Inggris telah memicu bangkitnya nasionalisme Inggris.²² Warga Inggris sebagai yang merasa negaranya sebagai yang dominan di Britania Raya tentu saja memiliki kebanggaan tersendiri jika memiliki sesuatu tanda bahwa mereka berbeda dibanding yang lainnya. Kumar mengatakan bahwa ini bukan merupakan nasionalisme yang didorong oleh politik, tetapi lebih tepatnya lebih kepada budaya. Setiap bangsa tentunya memiliki sesuatu yang menjadi suatu kebanggaan yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Kumar mengatakan nasionalisme yang dimiliki Inggris sebagai sebuah hal yang lumrah karena beberapa bangsa seperti Wales, Skotlandia, Slavs, dan Skandinavia juga sudah menemukan identitas mereka.

Pendapat Kumar mengenai nasionalisme Inggris yang membedakan mereka dengan negara konstituen yang ada di bawah kekuasaan Britania Raya mendapat tantangan dari Michael Kenny dalam bukunya yang berjudul *The Politics of English Nationhood* (2014) yang menyatakan bahwa nasionalisme Inggris mulai berkembang pada awal tahun 1990-an. Ini menjelaskan bagaimana nasionalisme bisa dikatakan berubah pada era kontemporer. Perjanjian Maastricht yang menghasilkan Uni Eropa sebagai suatu organisasi supranasionalisme yang mengintegrasikan Eropa berhasil mendefinisikan ulang apa itu nasionalisme Inggris. Nasionalisme Inggris bangkit pada masa-masa pasca terbentuknya Uni Eropa sebagai bentuk reaksi dari terbentuknya organisasi tersebut.²³ Adanya Uni Eropa sendiri sudah membangkitkan gerakan populisme yang mengarah kepada apa yang dinamakan Euroskeptisme.²⁴ Euroskeptisme adalah sebuah gerakan yang menyatakan tidak percaya terhadap Uni Eropa dan penolakan terbentuknya organisasi ini.²⁵ Tentu saja ini akan mengubah bagaimana nasionalisme Inggris berubah akibat dari proses integrasi yang akan menyebabkan berkembang nasionalisme Inggris dari yang hanya membedakan diri mereka dengan negara konstituen Britania Raya menjadi membedakan dirinya dengan seluruh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa adanya Uni Eropa memicu nasionalisme Inggris berkembang menjadi kesadaran homogen

²⁰ Krishan Kumar, *The Making of English National Identity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 1-2

²¹ *Ibid*, 14-15

²² *Ibid*, 200

²³ Michael Kenny, *The Politics of English Nationhood*, Oxford: Oxford University Press. 20014. 22

²⁴ *Ibid*, 29-30.

²⁵ Lisbeth Kirk, EU scepticism threatens European integration, *euobserver* (2001, June 22) Diakses dari <https://euobserver.com/news/2731>

yang orang Inggris miliki yang berasal dari terbentuknya Uni Eropa yang menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap orang luar.

Kumar dalam esainya yang berjudul *Empire and English Nationalism* (2006), ia mengungkapkan bahwa nasionalisme yang ia kembangkan dahulu mendapat tantangan dari Uni Eropa yang membuat orang-orang Inggris meningkatkan kesadarannya terhadap eksistensi mereka di tengah kehadiran orang-orang non-Inggris.²⁶ Kebijakan Uni Eropa mengenai pengungsi yang dijalankan dalam bentuk *Common European Asylum System* (CEAS) menegaskan bahwa negara-negara di dalam Uni Eropa merupakan area perlindungan bagi orang-orang yang mengalami kekerasan di negaranya sendiri.²⁷ Selanjutnya dijelaskan bahwa negara-negara anggota harus menggunakan pendekatan bersama untuk menjadikan Uni Eropa sebagai tempat perlindungan dengan standar tinggi bagi para pengungsi. Tentunya dengan kebijakan ini, banyak orang non-Inggris, non-kulit putih berdatangan ke Inggris yang menjadi sumber kecemasan bagi sebagian warga Inggris yang berkulit putih di Inggris.²⁸

Dari kecemasan itu, lahirnya berkembangnya sebuah nasionalisme Inggris yang baru untuk mengukuhkan posisi warga Inggris sebagai orang Inggris yang berbeda dengan orang lainnya. Nasionalisme Inggris kontemporer bisa dikatakan erat dengan sifat Euroskeptisme yang dimiliki oleh beberapa orang Inggris.²⁹ Apalagi hal tersebut juga mendorong terjadinya *British Exit* atau Brexit yang merupakan sebuah referendum untuk memilih apakah Britania Raya masih menjadi bagian dari Uni Eropa atau Tidak. Isu imigran merupakan hal pendorong terbesar terjadinya referendum tersebut yang dibahasakan sebagai perlindungan terhadap kedaulatan dan kebangsaan.³⁰ Bisa dikatakan bahwa terbentuknya Uni Eropa dan mudahnya akses bagi para pengungsi untuk bermigrasi ke negara-negara Uni Eropa termasuk Inggris sudah menyebabkan nasionalisme Inggris era kontemporer berkembang dari yang sebelumnya membedakan identitasnya dengan negara konstituen Britania Raya menjadi membedakan identitasnya dengan orang-orang non-Inggris dan non-kulit putih.

Aspek terakhir ini kemudian menjadi tema berulang dalam nasionalisme Inggris. Tidak hanya memisahkan warga Inggris dari warga Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales, nasionalisme Inggris ini juga memisahkan diri dari imigran dan orang-orang yang ‘tidak cukup Inggris’. Berbeda dengan nasionalisme Skotlandia yang baru-baru ini membahas isu imigrasi akibat dampaknya yang kecil terhadap negara tersebut (Fenton & Mann, 2017), sentimen anti-imigran atau setidaknya ketidaksukaan terhadap bagaimana pemerintahan menangani isu imigran merupakan tema besar dalam nasionalisme Inggris (Hall, Treadwell, & Winlow, 2016). Imigran dianggap diberlakukan secara khusus, terlampaui ‘berbeda’ dari warga Inggris pada umumnya, dan dianggap tidak bisa atau tidak mau berasimilasi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa bentuk kekerasan terhadap muslim yang terjadi di Inggris pada abad ke-21 mendapatkan semangat dan motifnya dari kegiatan ‘*Paki-bashing*’ yang rasis terhadap imigran keturunan Pakistan di Inggris pada dekade 1980an dan 1990an (Weller, 2006). Stereotip terhadap imigran dari Pakistan membungkus-ulang dirinya sebagai stereotip terhadap kaum

²⁶ Krishan Kumar, *Empire and English Nationalism*, *Nations and Nationalism* 12(1), hlm. 10, DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00227.x

²⁷ Common European Asylum System (CEAS) “What do We do?” https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en

²⁸ Kumar, *Empire and English Nationalism*, 10.

²⁹ Michael Kenny (2016), The Genesis of English Nationalism. *Political Insight* 7(2): 9. DOI: <https://doi.org/10.1177/2041905816666124>

³⁰ *Ibid*, 11

muslim. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana mayoritas muslim Inggris merupakan imigran, dan bagian besar dari imigran muslim berasal dari Pakistan.

Kemunculan nasionalisme Inggris yang bersamaan dengan pergeseran diskriminasi di ranah sosial dari dimensi etnis maupun ras menjadi etnis agama, yaitu pada tahun 1990an dan 2000an, tidak dapat dianggap sebagai kebetulan belaka yang membuat kedua fenomena tersebut perlu diisolasi dari satu sama lain. Pada perkembangannya, peristiwa-peristiwa seperti kasus Salman Rushdie, pengeboman 7 Juli, protes terhadap pulangannya resimen militer Inggris dari Iran di Luton, dan 9/11 menghasilkan respon yang membuat kedua hal tersebut saling berkelindan dan bersangkutan satu sama lain, seringkali secara sengaja.

b.) Orang Inggris dan Orang Muslim

Sentimen-sentimen yang telah dijelaskan di atas menjadi masalah, sebab populasi muslim di Britania Raya tidaklah sedikit. Berdasarkan sensus terbaru yang diadakan di tahun 2011 warga yang mengakui dirinya memeluk agama Islam berjumlah lebih dari 2 juta atau hampir 5 persen dari seluruh warga Britania Raya, sehingga menjadikannya kelompok agama terbesar kedua setelah Kristianitas. Dari jumlah tersebut, konsentrasi terbesar dari warga Muslim berada di dalam dan sekitar Kotamadya London di mana 37 persen dari warga Muslim di Britania Raya tinggal. Bahkan seorang warga Britania beragama Muslim, Sadiq Khan, dapat terpilih menjadi walikota London, penduduk non-kristiani pertama yang terpilih ke dalam jabatan tersebut. Melihat keadaan demografis ini bisa disimpulkan bahwa populasi Muslim Britania cukup signifikan, maka dalam sub-bab ini kita akan melihat sejarah keberadaan warga Muslim di Britania, serta relasi historisnya dengan warga Britania lainnya.

Interaksi Britania Raya dengan penduduk muslim dalam jumlah yang signifikan pertama kali muncul pada periode abad ke 18-19. Pada masa-masa ini, pelaut muslim dari kawasan India yang dijajah Inggris (kawasan yang seringkali disebut sebagai Raj Britania/*British Raj*) datang dan bertugas di Britania dimana beberapa darinya menetap di kota-kota pelabuhan, mendirikan komunitas-komunitas muslim pertama di Britania. Kelompok yang sudah ada ini kemudian bertambah jumlahnya secara signifikan pada tahun-tahun setelah perang dunia kedua di mana imigran maupun pengungsi dari bekas jajahan Britania seperti India, Pakistan, dan Uganda berdatangan³¹. Karena kedatangan mereka dalam jumlah yang tidak sedikit dan dalam jangka waktu yang relatif singkat pula, maka bisa disebut bahwa pada masa ini terjadi migrasi muslim yang pertama kalinya ke Britania Raya.

Mengingat populasi Britania Raya yang semula relatif homogen dan terdiri dari ras kulit putih yang beragama Kristiani, kedatangan para imigran membawa pula permulaan dari perbincangan akan multikulturalisme Britania. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa ini pun mencerminkan tumbuhnya perbincangan akan lewat undang-undang seperti *race relations act* di tahun 1965 yang mendorong otoritas setempat untuk mempromosikan persamaan etnis dan rasial di kawasannya secara lokal. "Lokalitas" dalam mengatur isu multikulturalisme ini bisa dibilang merupakan sebuah ciri khas dari kebijakan promosi hubungan ras yang baik di Britania pada masa itu. Pendekatan dalam level lokal ini pun dapat tercermin lewat pernyataan menteri dalam negeri periode 1965-1967 Roy Jenkins yang menyebutkan bahwa integrasi imigran ke dalam Britania adalah "*not a flattening process of assimilation but equal opportunity accompanied by cultural diversity in an atmosphere of mutual*

³¹ Mason, Robert. *Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy*. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016.

tolerance."³². Semua ini hendak mengatakan bahwa dalam periode pertengahan abad ke 20 ini, relasi antara imigran (muslim) di Britania dengan warga setempat adalah hubungan yang relatif didorong oleh kehendak untuk memberlakukan hubungan yang baik.

Walau hubungan antara imigran dengan penduduk asli Britania relatif baik, dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, ada satu hal yang harus dipahami dalam periode awal multikulturalisme Britania ini. Yakni bahwa para imigran ini diklasifikasikan sebagai minoritas ras dan etnis, tidak berdasarkan agama. Sebagaimana dikutip dari buku Mason. "*it is perhaps easier to ascertain that Muslims did not feature explicitly in this early multiculturalist approach that treated postwar migrants who arrived as Citizens of the United Kingdom and Commonwealth (CUKC) and subsequent British-born generations as ethnic and racial—but not as religious—minorities requiring state support and differential treatment to overcome distinctive barriers in their exercise of citizenship.*"³³.

Sikap ini mulai mengalami perubahan di dekade 1980-1990an dimana identitas "Islam" mulai dikedepankan oleh para imigran ini. Pertama-tama harus dipahami bahwa pada dekade-dekade sebelumnya identitas imigran ini dikelompokkan berdasarkan asal muasal "kebangsaan" mereka, misalnya identitas mereka sebagai orang Pakistan yang bermigrasi ke Britania. Sejak dekade 1980 an, dan bersamaan dengan perubahan demografis dimana para imigran generasi pertama mulai berumah tangga, pembicaraan akan identitas "Islam" serta diskriminasi yang mereka terima sebagai orang Islam pun muncul ke ranah publik. Perubahan sikap ini bisa dibilang dipuncaki oleh sebuah laporan di tahun 1997 dari sebuah badan bernama *Runnymede Trust* yang berjudul *Islamophobia: a Challenge for Us All*³⁴. Begitu juga dengan pemerintah Britania yang mulai menyikapi isu diskriminasi religius, terutama bagi kaum Muslim, dengan serius dan di tahun 1998 mengeluarkan survey guna mengkaji seberapa sering diskriminasi atas dasar agama terjadi. Survey ini pun menemukan bahwa sejumlah signifikan dari responden Muslim (hampir 50 persen) menyatakan bahwa diskriminasi yang mereka alami sudah menjadi masalah serius³⁵. Hal ini berarti bahwa terdapat pula perubahan sikap masyarakat Britania yang mulai melihat isu agama Islam sebagai sesuatu yang bisa dipermasalahkan.

Pada perkembangan kontemporer, bahkan setelah hubungan yang kuat selama ratusan tahun seperti yang telah dijelaskan di atas, 'Muslim' dan 'Inggris' masih dianggap sebagai dua entitas berbeda, terpisah, dan selamanya tidak bisa didamaikan. Kasus Salman Rushdie menjadi pemicu dari anggapan bahwa 'pandangan Barat' dan 'pandangan Muslim' akan selalu bertentangan dengan satu sama lain, dengan satu pihak menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan pihak lain tidak. Keadaan diperburuk dengan pengeboman 11 September 2001 di Amerika Serikat dan 7 Juli 2005 di London yang semakin mengedepankan wajah 'ekstremis Islam' di dunia barat yang memberikan suplai bagi anggapan 'ancaman fundamental' Islam terhadap gaya hidup masyarakat Inggris, senada dengan apa yang disampaikan Huntington dalam *Clash of Civilization*.

Muslim di Inggris, pada akhirnya, dikeluarkan dari Inggris versi para nasionalis ini. Mereka diidentifikasi sebagai 'yang Lain', sebagai warga luar yang tereksklusi dari tatanan masyarakat Inggris yang seharusnya³⁶. Muslim Inggris, meskipun sepenuhnya merupakan warga negara, tinggal di, dan berpartisipasi dalam masyarakat Inggris, dianggap sebagai bagian yang 'berbeda'. Mereka

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Weller, P. "Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslims and Liberal Democracies. The Case of the United Kingdom." *Journal of Islamic Studies* 17, no. 3 (2006): 295–325. <https://doi.org/10.1093/jis/etl001>.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ansari, H. "Muslims in Britain". *Minority Rights Group International*. 2002

dianggap beroperasi di wilayahnya sendiri dengan hukum syariah sendiri, intoleran terhadap warga luar, dan tidak bisa ditembus. Dalam bagian selanjutnya, akan dibahas bagaimana eksklusivitas ini, ditambah dengan identitas kolektif sebagai korban, melahirkan tindakan nyata langsung sebagai ‘perlawanan’.

c.) Kekerasan Melawan Muslim Sebagai ‘yang Lain’

Kekerasan yang terjadi pada komunitas muslim di Inggris disebabkan karena munculnya sebuah komunitas yang memiliki basis ‘pencegahan ideologi ekstrem’, atau apa yang sering disebut gerakan kontra-jihad. Gerakan ini mempublikasikan apa yang mereka sebut sebagai ‘Islam yang sesungguhnya’, membawa peringatan tentang ekstremisme muslim, menentang gerakan-gerakan kaum Muslim yang dianggap tidak sesuai dengan cara hidup Inggris, menyerang masjid dan tokoh-tokoh lainnya, serta menyerang bukan individu muslim, melainkan muslim sebagai kelompok. Mereka mengkritik pemberdayaan suara moderat dan penguatan komunitas muslim sebagai cara yang sia-sia dan kurang efektif, dan justru merupakan pertanda ‘kaum Kiri’ sebagai bagian dari pelaku yang menjadikan warga Inggris sebagai korban. Wacana-wacana ini disusun untuk mencegah pertukaran nilai dengan menekankan satu nilai moral hingga mengesampingkan nilai-nilai lain, terutama mengenai nilai-nilai yang mendefinisikan identitas kelompok.

Tindakan ini paling terlihat diejawantahkan oleh kelompok English Defence League. Kelompok ini mempercayai bahwa kehidupan masyarakat Inggris sedang diserang oleh ekstremis muslim dan ‘islamifikasi Global’. Sejak tahun 2009, mereka mencoba masuk ke dalam media Inggris dan membangun wajah publik sebagai ‘tidak rasis, tidak kasar, hanya muak’³⁷. Meskipun mereka seringkali dicap sebagai rasis, islamofobi, dan ekstrimis sayap-kanan, mereka menyematkan identitas ke diri sendiri sebagai penjaga hak warga negara Inggris, demokrasi, serta peraturan dan ketertiban di bawah hukum.

Narasi EDL sendiri seringkali menyamakan imigrasi ilegal dengan invasi, dan menyalahkan imigran muslim karena ‘mengimpor budaya terorisme ke Inggris’. Mereka percaya bahwa pelecehan dan pemerkosaan tertanam dalam teks-teks ajaran agama Islam. Termasuk di dalam daftar tuduhan EDL terhadap Islam adalah pencemaran nama baik dan penindasan terhadap perempuan, pelecehan seksual terorganisir terhadap anak-anak, dukungan terorisme, mutilasi alat kelamin perempuan, pembunuhan demi kehormatan, homofobia, rasisme, anti-Semitisme, dan intoleransi terhadap non-Muslim.³⁸ Aktivitas EDL tidak berhenti di media massa, tetapi juga langsung turun ke jalan. Mereka menyelenggarakan aksi sistematis yang memprotes keberadaan kaum muslim dan menyerang masjid-masjid atau pusat kebudayaan Islam³⁹. Mereka tidak percaya dengan politik elektoral, yang berarti bahwa mereka, seperti nasionalisme Inggris, tidak percaya tatanan politik yang ada, untuk menyelesaikan masalah.

Para punggawa EDL sendiri yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukan ekstremisme atau rasisme, melainkan gerakan akar rumput untuk melawan intoleransi⁴⁰. Nilai-nilai identitas kelompok begitu terinternalisasi di dalam mereka untuk tidak mengikuti arah-arrah yang lebih radikal dari neo-

³⁷ Kassimeris, George, and Leonie Jackson. “The Ideology and Discourse of the English Defence League: ‘Not Racist, Not Violent, Just No Longer Silent.’” *The British Journal of Politics and International Relations* 17, no. 1 (2014): 171–88. <https://doi.org/10.1111/1467-856x.12036>.

³⁸ Allen, Chris. “Opposing Islamification or Promoting Islamophobia? Understanding the English Defence League.” *Patterns of Prejudice* 45, no. 4 (2011): 279–94. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2011.585014>.

³⁹ Busher, Joel. “Why Even Misleading Identity Claims Matter: The Evolution of the English Defence League.” *Political Studies* 66, no. 2 (2017): 323–38. <https://doi.org/10.1177/0032321717720378>.

⁴⁰ *Ibid.*

nazi, anti-semit, dan neofasis seperti British National Party. Mereka menjaga rasa keorganisasian dengan mendapuk diri sebagai aktivis sosial alih-alih kumpulan orang-orang rasis yang islamofobia. Pada gantinya, nilai identitas kelompok ini juga identik dengan viktimisasi atau secara sistematis mendudukkan EDL dan Tommy Robinson sebagai ‘korban’ dan muslim, Islam, elit politik, dan kaum ‘kiri’ sebagai ‘pelaku’⁴¹. Viktimisasi ini pada gilirannya mendapatkan akar dari perasaan ketidakberdayaan dan ketidakadilan melawan dinamika baru politik dan ekonomi Inggris⁴².

Akar ini secara eksplisit menunjuk pada tatanan kapitalisme yang tidak menguntungkan banyak kelas pekerja kulit putih Inggris. Secara empiris, EDL memang mampu menarik keanggotaan dari demografi tersebut⁴³ meskipun survei ekstensif menunjukkan bahwa dukungan terhadap EDL juga bisa jadi lebih luas daripada apa yang diperkirakan oleh analisis tipe ini⁴⁴. Treadwell dan Garland sendiri dalam riset etnografisnya mampu menempatkan kecemasan dan alienasi yang dirasakan oleh pekerja Inggris, utamanya pekerja laki-laki kulit putih Inggris, yang menyebabkan maskulinitas mereka disalurkan ke dalam kekerasan terhadap kaum muslim sebagai ganti dari larangan kekerasan semacam itu di tempat mereka sebelumnya beroperasi, yaitu stadium sepakbola.

Faktor-faktor ini tidak lain dari faktor yang sama yang mempengaruhi politik kelas pekerja Inggris yang semakin tidak percaya dengan partai yang seharusnya merepresentasikan partai mereka, Partai Buruh, dan pada gantinya memilih Partai Konservatif atau malah tidak percaya dengan tatanan politik Westminster sama sekali⁴⁵. Lebih lanjut, pelucutan bantuan sosial secara sistematis dan kekalahan dalam zona saing neoliberalisme yang dimulai sejak akhir paruh kedua abad ke-20 turut berkontribusi terhadap politik identitas kaum pekerja yang bergeser ke sayap kanan. Oleh karena itu, faktor yang sama juga dapat ditemukan dalam kebencian para nasionalis Inggris terhadap satu entitas besar lain, yaitu Uni Eropa. Dalam bentuk viktimisasi yang lain, Inggris dianggap sebagai ‘korban’ dari elit birokrat Brussel, ibukota Uni Eropa⁴⁶. Pada saat Inggris Raya resmi keluar dari Uni Eropa, Nigel Farage merayakannya dengan menyatakan bahwa ‘Inggris telah merdeka’. Farage sendiri mengkampanyekan Brexit melalui partainya, UKIP (Partai Kemerdekaan Inggris Raya), yang pada gantinya banyak dipilih oleh anggota English Defence League⁴⁷. Kesamaan ini juga tidak luput dari para akademisi yang mencatat bahwa di kemudian hari, faktor ras dan rasisme yang sama yang melahirkan kekerasan anti-muslim merupakan faktor yang juga berperan besar dalam Brexit⁴⁸.

Dengan kata lain, kaum muslim di Inggris akhirnya berhenti menjadi ‘Orang Inggris’ dan mulai menjadi ‘yang Lain daripada Orang Inggris’ akibat nasionalisme yang mengidentifikasi

⁴¹ Oaten, Alexander. “The Cult of the Victim: an Analysis of the Collective Identity of the English Defence League.” *Patterns of Prejudice* 48, no. 4 (2014): 331–49. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2014.950454>.

⁴² Goodwin, Matthew. “The Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad Challenge.” Chatham House – International Affairs Think Tank, October 6, 2020. <http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/189767>.

⁴³ Garland, Jon, and James Treadwell. “The New Politics of Hate? An Assessment of the Appeal of the English Defence League Amongst Disadvantaged White Working- Class Communities in England.” *Journal of Hate Studies* 10, no. 1 (2012): 123. <https://doi.org/10.33972/jhs.116>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mann, R., & Fenton, S. (2017). *Nation, Class and Resentment: The Politics of National Identity in England, Scotland and Wales*. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

⁴⁶ Corbett, Steve. “The Social Consequences of Brexit for the UK and Europe: Euroscepticism, Populism, Nationalism, and Societal Division.” *The International Journal of Social Quality* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.3167/ijsq.2016.060102>.

⁴⁷ Goodwin, Matthew. “The Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad Challenge.” Chatham House – International Affairs Think Tank, October 6, 2020. <http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/189767>.

⁴⁸ Virdee, Satnam, and Brendan McGeever. “Racism, Crisis, Brexit.” *Ethnic and Racial Studies* 41, no. 10 (2017): 1802–19. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1361544>.

bahwa ciri-ciri utama menjadi ‘Orang Inggris’ adalah utamanya kelas pekerja kulit putih beragama Kristen dengan leluhur yang lahir di Inggris, bukan di tempat lain. Dengan rasisme sistematis yang diajukan oleh EDL dan kelompok-kelompok ultranasionalis lain ini, secara efektif kaum muslim Inggris berada di luar sistem yang berfungsi untuk membedakan siapa yang Inggris dan siapa yang bukan. Sistem ini juga berfungsi untuk membedakan siapa teman dan siapa musuh, siapa yang dirugikan dan siapa yang menjadi penyebab kerugian tersebut. Oleh karena itu, kekerasan berbasis-identitas menjadi niscaya karena setelah pembedaan yang sistematis, nasionalisme Inggris kontemporer yang didasarkan pada kebencian dan kekecewaan massal menysar siapa-siapa yang dianggap sebagai ‘penyebab’, dalam hal ini adalah kaum muslim Inggris.

Kesimpulan: Manifestasi Kekerasan dari Identitas Eksklusif

Nasionalisme Inggris, pada bentuknya yang kontemporer, membuka jalan bagi aksi-aksi kekerasan anti-muslim dengan pertama membentuk identitas yang eksklusif bagi masyarakat Inggris yang pada gantinya, diskriminatif terhadap muslim yang dianggap sebagai non-Inggris. Politik identitas digunakan sebagai alat untuk memisahkan ‘Inggris’ dan ‘Muslim’, menempatkan posisi yang pertama sebagai korban dan yang kedua sebagai pelaku. Viktimisasi ini, pada gantinya, memberikan jalan bagi mereka yang ingin berperilaku tidak adil, kasar, semena-mena, atau bahkan sangat keras terhadap kaum muslim di Inggris. Pengejawantahan dari kegiatan diskriminatif ini datang dari kelompok-kelompok ‘kontra-jihad’ yang, meskipun mengklaim diri sebagai kelompok aktivis sosial pembela hak asasi manusia, namun erat kaitannya dengan islamofobia, rasisme, dan bahkan gerakan sayap kanan ekstrem.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebangkitan nasionalisme Inggris beriringan dengan munculnya gelombang imigrasi di Eropa pada umumnya dan di Inggris pada khususnya, yang membuat mudahnya akses bagi para pengungsi termasuk dari kaum muslim bermigrasi ke negara-negara Uni Eropa termasuk Inggris juga. Hal tersebut membuat nasionalisme Inggris era kontemporer berkembang dari yang sebelumnya membedakan identitasnya dengan negara konstituen Britania Raya menjadi membedakan identitasnya dengan orang-orang non-Inggris dan non-kulit putih. Dengan adanya perkembangan dalam paham nasionalisme Inggris, dan diperkuat dengan pandangan yang berbeda (dalam hal ini yakni pandangan barat dan pandangan muslim) membuat identitas ‘Muslim’ dan ‘Inggris’ masih dianggap sebagai dua entitas berbeda, terpisah, dan selamanya tidak bisa didamaikan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat Inggris yang nasionalis mengidentifikasi ras minoritas muslim di Inggris sebagai “Orang Lain” yang terpisah dari tatanan masyarakat Inggris yang sebenarnya, meskipun Inggris dan Muslim telah memiliki hubungan baik beberapa ratus tahun sebelumnya.

Fenomena ini juga membuat munculnya komunitas-komunitas di Inggris yang memiliki basis ‘pencegahan ideologi ekstrem’, atau gerakan kontra-jihad. Gerakan tersebut mempublikasikan apa yang mereka sebut sebagai ‘Islam yang sesungguhnya’, dimana mereka akan membawa peringatan tentang ekstremisme muslim, menentang gerakan-gerakan kaum Muslim yang dianggap tidak sesuai dengan cara hidup Inggris, menyerang masjid dan tokoh-tokoh lainnya, serta menyerang bukan individu muslim, melainkan muslim sebagai kelompok. Tindakan-tindakan tersebut sangat terlihat terutama oleh komunitas atau kelompok English Defence League (EDL), dimana mereka mempercayai bahwa kehidupan masyarakat Inggris sedang diserang oleh ekstrimis muslim dan

‘islamifikasi Global’. Kelompok EDL juga menggunakan politik identitas untuk menyebarkan narasi mereka terutama melalui media sosial yang menyamakan imigrasi ilegal dengan invasi, dan menyalahkan imigran muslim karena ‘mengimpor budaya terorisme ke Inggris. Tetapi, perlu diketahui juga bahwa aktivitas EDL tidak hanya berhenti di media massa, tetapi EDL juga langsung turun ke jalan, dimana mereka akan menyelenggarakan aksi sistematis yang memprotes keberadaan kaum muslim dan menyerang masjid-masjid atau pusat kebudayaan Islam di Inggris.

Oleh karena itu, EDL dan Tommy Robinson, meskipun sering dicap ekstremis dan tidak merepresentasikan pandangan masyarakat Inggris secara umum, namun sentimen-sentimen yang menjadi penggerak kegiatan mereka pada umumnya tidak berbeda dengan banyak pandangan yang dimiliki oleh masyarakat. Sentimen-sentimen ini berupa rasa tertindas dan tertinggalkan, rasa bahwa kelompok minoritas lain, seperti Skotlandia dan imigran Muslim, diperlakukan secara terlalu istimewa, dan rasa ditindas oleh entitas asing bernama Uni Eropa, untuk menyebutkan beberapa. Tommy Robinson dan EDL jauh dari interpretasi ekstrem terhadap sentimen luas dan justru merupakan konsekuensi logis dari penggambaran Islam serta narasi-narasi ke-Inggris-an yang telah muncul beberapa dekade sebelumnya, baik itu di jalanan maupun di media massa. Menekankan kembali banyak catatan yang dilakukan oleh para penulis tentang EDL, kelompok ini tidak bisa diisolasi sendiri, dan pada akhirnya masyarakat Inggris perlu menghadapi kenyataan bahwa norma dan tatanan sosial mereka bukan hanya membolehkan dan membiarkan, tetapi juga memberi ruang dan mendukung tindakan-tindakan seperti ini.

Daftar Pustaka

- Abbas, Tahir. “Islamophobia as Racialised Biopolitics in the United Kingdom.” *Philosophy & Social Criticism* 46, no. 5 (2020): 497–511. <https://doi.org/10.1177/0191453720903468>.
- Allen, Chris. “Opposing Islamification or Promoting Islamophobia? Understanding the English Defence League.” *Patterns of Prejudice* 45, no. 4 (2011): 279–94. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2011.585014>.
- Allievi, Stefano. “Reactive Identities and Islamophobia.” *Philosophy & Social Criticism* 38, no. 4-5 (2012): 379–87. <https://doi.org/10.1177/0191453712444423>.
- Ansari, H. “Muslims in Britain”. Minority Rights Group International. 2002
- Aughey, Arthur. “Anxiety and Injustice: the Anatomy of Contemporary English Nationalism*.” *Nations and Nationalism* 16, no. 3 (2010): 506–24. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2009.00422.x>.
- Barker, Fiona. “Immigrant Newcomers and the Old Politics of Nationalism.” *Nationalism, Identity and the Governance of Diversity*, n.d. <https://doi.org/10.1057/9781137339317.0005>.
- Bartlett, Jamie, dan Mark Littler. “Inside the EDL: Populist Politics in a Digital Age.” *Demos*, 2011, 57. https://doi.org/https://www.demos.co.uk/files/Inside_the_edl_WEB.pdf.
- Berlin, Isaiah. *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (Second Edition)*. Princeton University Press, 2013.

Busher, Joel. "Grassroots Activism in the English Defence League: : Discourse and Public (Dis)Order." *Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism*, March 14, 2013, 65–83. <https://doi.org/10.5040/9781501300967.ch-004>.

Busher, Joel. "Why Even Misleading Identity Claims Matter: The Evolution of the English Defence League." *Political Studies* 66, no. 2 (2017): 323–38. <https://doi.org/10.1177/0032321717720378>.

Chakraborti, Neil, dan Jon Garland. "Reconceptualizing Hate Crime Victimization through the Lens of Vulnerability and 'Difference.'" *Theoretical Criminology* 16, no. 4 (2012): 499–514. <https://doi.org/10.1177/1362480612439432>.

Copsey, Nigel, Matthew Feldman, Michael Littler, dan Janet Dack. "Anti-Muslim Hate Crime and the Far Right." *Centre of Fascist, Anti-Fascist, and Post-Fascist Studies*, June 2013, 1–27. https://doi.org/http://clok.uclan.ac.uk/11111/1/11111_littler.pdf.

Corbett, Steve. "The Social Consequences of Brexit for the UK and Europe: Euroscepticism, Populism, Nationalism, and Societal Division." *The International Journal of Social Quality* 6, no. 1 (2016): 11–31. <https://doi.org/10.3167/ijsq.2016.060102>.

Dodd, Vikram. "Anti-Muslim Hate Crimes Soar in UK after Christchurch Shootings." *The Guardian*. Guardian News and Media, March 22, 2019. <https://www.theguardian.com/society/2019/mar/22/anti-muslim-hate-crimes-soar-in-uk-after-christchurch-shootings>.

Dunbar, Edward. "Race, Gender, and Sexual Orientation in Hate Crime Victimization: Identity Politics or Identity Risk?" *Violence and Victims* 21, no. 3 (June 1, 2006): 323–37. <https://doi.org/10.1891/vivi.21.3.323>.

Ford, Robert, and Matthew Goodwin. "Understanding UKIP: Identity, Social Change and the Left Behind." *The Political Quarterly* 85, no. 3 (2014): 277–84. <https://doi.org/10.1111/1467-923x.12099>.

Garland, Jon, and James Treadwell. "The New Politics of Hate? An Assessment of the Appeal of the English Defence League Amongst Disadvantaged White Working- Class Communities in England." *Journal of Hate Studies* 10, no. 1 (2012): 123. <https://doi.org/10.33972/jhs.116>.

Goodwin, Matthew. "The Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad Challenge." *Chatham House*, March 1, 2013, 16. <https://doi.org/http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/189767>.

Goodwin, Megan. "Unmasking Islamophobia: Anti-Muslim Hostility and/as White Supremacy." *Journal of the American Academy of Religion* 88, no. 2 (2020): 354–86. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfaa012>.

Henderson, Ailsa, Charlie Jeffery, Dan Wincott, and Richard Wyn Jones. "How Brexit Was Made in England." *The British Journal of Politics and International Relations* 19, no. 4 (2017): 631–46. <https://doi.org/10.1177/1369148117730542>.

Hunsberger, Bruce, Michael Pratt, and S. Mark Pancer. 1994. "Religious Fundamentalism and Integrative Complexity of Thought: A Relationship for Existential Content Only?" *Journal for the Scientific Study of Religion*. <https://doi.org/10.2307/1386493>.

Jones, Richard Wyn, Guy Lodge, Charlie Jeffery, Glenn Gottfried, Roger Scully, Ailsa Hendersonn, and Daniel Wincott. "England and Its Two Unions: The Anatomy of a Nation and Its Discontents." *Institute For Public Policy Research (IPPR)*, July 2013, 4–40. https://doi.org/https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2013/07/england-two-unions_Jul2013_11003.pdf?noredirect=1.

Jost, John T., Jack Glaser, Arie W. Kruglanski, and Frank J. Sulloway. 2003. "Political Conservatism as Motivated Social Cognition." *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339>.

Kassimeris, George, and Leonie Jackson. "The Ideology and Discourse of the English Defence League: 'Not Racist, Not Violent, Just No Longer Silent.'" *The British Journal of Politics and International Relations* 17, no. 1 (2014): 171–88. <https://doi.org/10.1111/1467-856x.12036>.

Kenny, Michael. "The Genesis of English Nationalism." *Political Insight* 7, no. 2 (2016): 8–11. <https://doi.org/10.1177/2041905816666124>.

Kenny, Michael. "The Politics of English Nationhood," 2014. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199608614.001.0001>.

Kirk, Lisberth. "EU Scepticism Threatens European Integration." *EUobserver*, June 22, 2001. Diakses pada 27 Januari 2021, <https://euobserver.com/news/2731>.

Kumar, Krishan. 2003. *The Making of English National Identity*. The Making of English National Identity. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511550058>.

KUMAR, KRISHAN. "Empire and English Nationalism*." *Nations and Nationalism* 12, no. 1 (2006): 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00227.x>.

KUMAR, KRISHAN. "English and French National Identity: Comparisons and Contrasts*." *Nations and Nationalism* 12, no. 3 (2006): 413–32. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00247.x>.

Lambert, Robert. "Anti-Muslim Violence in the UK: : Extremist Nationalist Involvement and Influence." *Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism*, 2015, 31–64. <https://doi.org/10.5040/9781501300967.ch-003>.

Mann, Robin, and Steve Fenton. *Nation, Class and Resentment: the Politics of National Identity in England, Scotland and Wales*. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017.

Mason, Robert. *Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy*. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016.

Oaten, Alexander. "The Cult of the Victim: an Analysis of the Collective Identity of the English Defence League." *Patterns of Prejudice* 48, no. 4 (2014): 331–49. <https://doi.org/10.1080/0031322x.2014.950454>.

Saroglou, Vassilis. 2002. "Beyond Dogmatism: The Need for Closure as Related to Religion." *Mental Health, Religion and Culture*. <https://doi.org/10.1080/13674670210144130>.

Strozier, Charles B. *The Fundamentalist Mindset: Psychological Perspectives on Religion, Violence, and History*. Oxford University Press, 2010.

"English Defence League (EDL)." Counter Extremism Project, December 2, 2020. Diakses pada 27 Januari 2021, <https://www.counterextremism.com/supremacy/english-defence-league-edl>.

"Common European Asylum System." Migration and Home Affairs - European Commission, December 6, 2016. Diakses pada 27 Januari 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en.

The National. "Attacks against UK Muslims Increase in Violence." The National. The National, November 29, 2018. Diakses pada 27 Januari 2021, <https://www.thenationalnews.com/world/europe/attacks-against-uk-muslims-increase-in-violence-1.797179>.

Virdee, Satnam, and Brendan McGeever. "Racism, Crisis, Brexit." *Ethnic and Racial Studies* 41, no. 10 (2017): 1802–19. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1361544>.

Winlow, Simon, Steve Hall, and James Treadwell. 2016. *The Rise of the Right: English Nationalism and the Transformation of Working-Class Politics*.

Weller, P. "Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslims and Liberal Democracies. The Case of the United Kingdom." *Journal of Islamic Studies* 17, no. 3 (2006): 295–325. <https://doi.org/10.1093/jis/etl001>.

Wellings, Ben. "Losing the Peace: Euroscepticism and the Foundations of Contemporary English Nationalism." *Nations and Nationalism* 16, no. 3 (2010): 488–505. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2010.00447.x>.